

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, fenomena xenofobia sudah menjadi hal yang umum untuk diperbincangkan di lingkup studi Hubungan Internasional terutama mengenai peningkatan protes-protes xenofobia di Eropa (Jones & Stan, 2017). Xenofobia sendiri merupakan sentimen yang dimiliki oleh seseorang karena adanya rasa takut, tidak suka atau kebencian terhadap orang asing. Masyarakat yang memiliki pemikiran xenofobia cenderung menganggap Imigran sebagai orang-orang kriminal yang kejam, jahat, miskin dan tidak berpendidikan (Espenshade & Henpstead, 1996, hal. 9). Pemikiran ini juga terjadi di kawasan yang terbilang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi yaitu Eropa.

Selama kurun waktu dari tahun 2012 hingga tahun 2017, sentimen xenofobia jauh meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah imigran di Eropa (Marozzi, 2015). Dari data statistik Uni Eropa (EU) pada tahun 2017, negara-negara di Eropa menerima sekitar 4,7 juta imigran dari arus imigrasi tahun 2015 sedangkan 2,8 juta jiwa memilih mencabut kependudukan sebagai negara anggota EU. Dari seluruh jumlah tersebut, Prancis merupakan negara ketiga setelah Jerman dan Inggris yang paling banyak menampung para imigran yaitu sebanyak 363,9 ribu jiwa (European Commission, 2017).

Masalah xenofobia sendiri bukanlah hal yang baru di Prancis. Xenofobia yang mulai muncul dari tahun 1880 tersebut mengalami kenaikan dan penurunan

(Brubaker, 1992, hal. 112). Namun dimulai dari tahun 2012 ketika Prancis diduduki oleh pemerintahan Francois Hollande dan Emmanuel Macron, angka xenofobia terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017.

Walau aksi-aksi terhadap xenofobia saat ini lebih besar kepada imigran-imigran di Prancis, namun masyarakat minoritas di Prancis turut menjadi sasaran. Stereotip masyarakat mengenai imigran telah terbentuk dengan buruk bahkan, Sarkozy pernah mengatakan bahwa minoritas dan imigran yang tinggal di pinggiran kota sebagai kaum yang urakan atau pemberontak (BBC, 2012).

Dalam teorinya, keadaan ras yang heterogen dapat meninggikan angka tensi ras karena semakin besar proporsi dari kelompok minoritas maka semakin besar kompetisi yang terbentuk dalam kesempatan pekerjaan dan seluruh akses ekonomi dalam sumber daya negara. Tidak hanya dalam bentuk objek saja, namun sebagai persepsi subjek, orang-orang yang terlihat berbeda dari orang pada umumnya dapat menjadi ancaman (McClain, et al., 2006, p. 575). Sedangkan dilihat dari sistem hukum Prancis saja, tidak ada pencantuman secara eksplisit mengenai nasionalisme, ras, etnis atau agama untuk minoritas. Sistem hukum Prancis hanya menegaskan hubungan antar negara dengan individu saja. Dengan tujuan awal untuk menegakkan *absolute equality* namun, yang terjadi pada kenyataannya adalah sistem hukum tersebut menjadikan minoritas tidak terlihat di depan hukum (Republique Francaise, 1978, pp. 9-13). Hal ini juga terinterpretasikan bahwa pemerintah dilarang untuk menghitung data atau statistik mengenai ras, etnis, agama atau hal-hal yang masih belum terlihat di masyarakat Prancis serta sensus nasional tidak boleh melibatkan pertanyaan mengenai rasa atau etnis (Jansen, 2016).

Dari legal sistem saja, minoritas di Prancis sudah mengalami diskriminasi. Belum lagi bagi minoritas Muslim dibenturkan dengan nilai Prancis *laïcité* atau sekuler. Hal tersebut mengakibatkan pelarangan burka dan niqab bagi wanita Muslim di setiap tempat umum di Prancis. Wanita Muslim hanya diperbolehkan menggunakannya di rumah dan ketika keluar untuk melakukan ibadah saja (Weaver, 2017). Masyarakat minoritas dituntut untuk mempraktikkan segala nilai yang ada di Prancis namun kesulitan untuk mempertahankan nilai mereka yang sudah melekat (Inhae, 2016).

Aksi-aksi kekerasan terhadap minoritas juga turut meningkat seiring berjalannya waktu. Aksi-aksi tersebut juga bersamaan dengan teror-teror yang berhubungan dengan minoritas-minoritas di Prancis walaupun terornya terjadi di luar Prancis. Aksi-aksi diskriminasi kepada masyarakat minoritas tidak hanya berupa verbal, melainkan aksi nyata yang dilakukan oleh masyarakat dengan nasionalisme yang tinggi. Aksi ini dilakukan terutama kepada Muslim di Prancis karena tragedi-tragedi yang berhubungan dengan ISIS di Charlie Hebdo. Tragedi ini disusul dengan *march* mengenai kebebasan berbicara di Prancis dan hampir tidak ada Muslim yang turut serta (Birnbaum M. , 2016).

Peningkatan angka-angka xenofobia tersebut juga disusul dengan meningkatnya angka-angka protes rasis, anti-semitis, *islamophobia* yang menandakan sebagai aksi dari sikap xenofobia mereka. Bahkan banyak komunitas yang terbentuk dalam melancarkan aksi-aksi tersebut. Hal ini tentunya mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan (Chazan, 2014).

Masa jabatan Francois Hollande sebagai presiden menjadi masa awal kebijakan Prancis yang tidak anti imigran setelah Sarkozy sebagai wakil dari partai kanan berpendapat bahwa di Prancis sudah terlalu banyak orang asing dan Prancis tidak sanggup untuk berintegrasi secara penuh dengan minoritas, orang asing dan imigran-imigran yang ada (Samuel H. , 2012). Hollande sangat anti terhadap aksi kekerasan termasuk yang mengindikasikan rasisme, anti-semitis hingga xenofobia. Hollande bahkan sangat aktif dalam mempromosikan hak asasi manusia agar aksi-aksi kekerasan tersebut terhindar di Prancis (Rubin & Breeden, 2015).

Pemerintahan Hollande memutuskan berbagai kebijakan untuk diterapkan dalam merespon kenaikan angka xenofobia. Arah kebijakan Pemerintah Prancis fokus dalam proses integrasi kaum muda dengan tiga aspek yaitu aspek pendidikan seperti pengajaran Bahasa Prancis terhadap anak-anak imigran, aspek pekerjaan dengan dibukanya lapangan pekerjaan oleh pemerintah Prancis yang bekerja sama dengan Acse sebagai lembaga perlindungan hak asasi di Prancis dan aspek kohesi sosial dengan kerjasama aktor non-pemerintah dan komunitas lokal. Selain itu, pendekatan baru demi memecah ketidaksetaraan di Prancis juga menjadi target utama Prancis kala Hollande menjabat (Dublet, 2014, hal. 5).

Pemerintah tidak segan melarang segala aktivitas yang berkaitan dengan xenofobia dan yang mengancam keamanan serta perdamaian nasional agar pemikiran xenofobia tidak cepat menyebar seperti pelarangan segala aktivitas perkumpulan yang pernah dilakukan oleh kelompok Pegida yang merupakan kelompok anti-imigran 2016 lalu (Glasser, 2016). Selain itu pemerintah Prancis turut mempromosikan hak asasi manusia sesuai dengan aturan EU dengan dipermudahnya kependudukan bagi Pencari suaka. Pencari suaka bahkan diberikan

jaminan hak oleh pemerintah (The Law Library of Congress, 2016). Prancis juga banyak melakukan kerjasama dengan Lembaga-lembaga lainnya baik dari tingkat internasional, regional maupun lokal mengenai isu ras dan diskriminasi. Prancis juga turut aktif dalam mempromosikan hak asasi manusia dan juga aktif dalam konferensi internasional mengenai hak asasi manusia (France Diplomatie, 2013).

Setelah lima tahun menjabat sebagai Presiden, Hollande kemudian digantikan oleh Emmanuel Macron yang menang dari Marie Le Pen pada Bulan Mei 2017 lalu. Emmanuel Macron mulai menjabat sebagai presiden di Prancis dengan kebijakannya yang ketat terhadap arus imigran dan Pencari suaka. Kebijakan tersebut meliputi keinginan Macron untuk mengembalikan imigran ilegal kembali ke negara asal mereka lalu membatalkan berkas Pencari suaka yang gagal dan memulangkan imigran dengan tujuan ekonomi (McGuinness, 2018). Walau kebijakan Macron dinilai ketat, tidak menjadi nilai bahwa Macron merupakan pemerintah yang tidak toleran. Sama seperti Hollande, Macron juga sangat aktif dalam melakukan tindakan yang mendukung hak asasi manusia seperti berjanji untuk melawan aksi-aksi kekerasan terutama kepada wanita apalagi wanita yang ada dalam kelompok minoritas sering mendapatkan diskriminasi. Selain itu, Macron juga memerintahkan agar dikerahkannya polisi lebih meluas dibandingkan sebelumnya hasil mencegah 30 serangan yang direncanakan. Selain itu, di bawah pemerintahannya, Macron dapat membubarkan 11 kelompok agama ekstremis dan menangkap 41 orang yang memberikan bantuan kepada simpatisan ekstremis (DW News, 2017). Macron mengatakan akan mendukung setiap gerakan yang bertujuan untuk memerangi intoleransi di manapun (Agence France-Presse, 2017).

Selain aktif dalam mendukung gerakan anti kekerasan, Macron juga tidak kalah aktif dalam membela status para imigran. Bahkan Macron mendukung kebijakan yang telah dilakukan oleh Merkel di EU dalam membuka gerbang sebesar-besarnya bagi para imigran. Selain itu, fokus yang diberikan oleh Macron kepada Pencari suaka dalam memberi perlindungan terbilang cukup baik. Namun, Macron tidak sepenuhnya setuju untuk memberikan “perlindungan” tersebut kepada seluruh Pencari suaka, beberapa dari mereka menurut Macron harus kembali ke negaranya semula (Murphy, 2017). Macron juga menunjukkan bahwa dirinya peduli dengan hak asasi manusia kepada imigran dengan tidak segan terlibat langsung dalam merelokasi para imigran di 20.000 unit penginapan. Selain itu, Macron juga berniat untuk membantu para imigran mempelajari Bahasa Prancis. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Macron ini merupakan langkah yang ketat terhadap imigran dan Pencari suaka namun tetap tidak ingin ada aksi kekerasan terjadi (Nossiter, 2018).

Usaha dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dimaksudkan untuk mendorong masyarakat agar lebih terbuka walau pada Macron kebijakan imigrasi terbilang cukup ketat namun tetap membela hak asasi imigran. Usaha-usaha tersebut justru tidak sesuai dengan harapan. Buktinya angka xenofobia di Prancis di tahun 2013 yang pada awal hanya sebanyak 22,7% masyarakat mengatakan bahwa mereka tidak ingin bertetangga dengan warga asing menjadi meningkat. Bahkan aksi-aksi protes anti-imigran di Prancis juga turut meningkat (Fisher, 2013). Kebijakan pemerintah Prancis menjadi alasan terjadinya protes dan bahkan menjadi pendorong xenofobia tersebut. Sedangkan pada tahun 2014, dari survei yang dilakukan oleh Ipsos, banyak masyarakat Prancis yang tidak menyukai

masyarakat asing. Sebanyak 66% dari poling tersebut mengatakan bahwa masyarakat asing sudah terlalu banyak tinggal di Prancis sedangkan 59% menuding bahwa para imigran di sana tidak berusaha untuk berintegrasi dengan masyarakat asli. Angka tersebut meningkat sebanyak 4% dari tahun 2013 lalu. Selain itu, masyarakat yang mengatakan bahwa budaya Islam tidak dapat disatukan dengan budaya Prancis sebanyak 63% (France 24, 2014). Angka tersebut tetap meningkat di tahun-tahun selanjutnya (United Nation, 2017).

Jika dilihat dilihat dari populasi penduduk di Prancis pada tahun 2016 sebanyak 67 juta jiwa, lalu jumlah imigran kurang lebih 8 juta jiwa, maka total imigran dibandingkan jumlah penduduk adalah 6,6% (European Commission, 2017). Hal tersebut mengartikan bahwa 6,6% dari 67 juta jiwa tersebut begitu memberi pengaruh terhadap peningkatan xenofobia terutama pada survei YouGov tahun 2016 lalu, sebanyak 47% masyarakat Prancis mengaku terlalu banyak orang asing dan Prancis sudah tidak seperti rumah lagi (Osborne, 2016). Selain itu, dilihat dari fakta-fakta di atas, terdapat paradoks dimana Pemerintah Prancis telah berupaya dengan usaha dan kebijakannya dalam melawan sentimen xenofobia baik dari level internasional, regional maupun lokal namun angka xenofobia justru semakin meningkat. Persentase angka imigran yang kurang dari 10% dan paradoks tersebut membuat penulis semakin tertarik untuk meneliti fakta-fakta yang ada lebih lanjut lagi.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa terjadi peningkatan fenomena xenofobia di Prancis dalam periode kepemimpinan Francois Hollande dan Emmanuel Macron (2012-2018)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi peningkatan xenofobia di Prancis pada tahun 2010 hingga tahun 2017.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dalam meningkatnya xenofobia di Prancis.
3. Untuk mengetahui efektivitas usaha pemerintah Prancis dalam melawan sentimen xenofobia.

1.4 Signifikansi

Penelitian ini penting dilakukan mengingat Prancis merupakan salah satu negara di Eropa Barat dan merupakan anggota EU yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh EU. Tingkat xenofobia yang semula rendah dan terus meningkat hingga saat ini tentu memiliki pengaruh juga ke negara-negara Eropa lainnya yang notabene Prancis menduduki tingkat ketiga dengan orang asing terbanyak di Eropa. Upaya pemerintah dalam melawan sentimen xenofobia bahkan dilakukan hingga ke tingkat internasional namun justru tingkat xenofobia semakin melonjak dari tahun ke tahun. Paradoks tersebut belum menjadi perhatian masyarakat untuk diteliti hingga saat ini terutama dalam periode kepemimpinan Francois Hollande dan Emanuel Macron. Sebagian besar penelitian hanya meneliti dalam level sosial tanpa mempertimbangkan kebijakan pemerintah (Hargreaves, 2007) atau dalam level pemerintahannya terutama sayap kanan saja (Freedman, 2004) atau bahkan membahas dari sisi kewarganegaraan (Taras, 2012). Belum ada penelitian yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat Prancis sebagai pendorong dari meningkatnya sentimen xenofobia di Prancis. Penelitian ini akan mencoba untuk mendukung

penelitian-penelitian yang telah ada sebagai pelengkap dalam menyambungkan dua variabel tersebut.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam lingkup kajian Politik dan Pemerintahan Negara Prancis serta kajian sosial masyarakat Prancis pada periode kepemimpinan Francois Hollande dan Emmanuel Macron. Dengan memusatkan pada keadaan sosial domestik, kebijakan luar negeri dan hubungan dengan EU, penelitian ini hanya mengambil daerah regional Eropa Barat dengan negara-negara yang bersinggungan atau dengan aktor-aktor yang berpengaruh. Lalu, penelitian ini akan dibahas dari tahun 2012 sampai tahun 2018 saat angka xenofobia di Prancis mengalami kenaikan. Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Prancis yang dilakukan baik dari level internasional, regional maupun lokal dalam melawan xenofobia. Selain itu, kelompok kepentingan, media dan keadaan sosial Prancis juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Lalu hal-hal yang mempengaruhi pemikiran masyarakat Prancis terhadap nilai yang ada pada mereka dan juga mengenai imej mereka terhadap orang asing sehingga hal-hal tersebut menjadi identitas pendukung bagi sentimen xenofobia mereka.

1.6 Kajian Pustaka

Dalam penelitian pustaka mengenai sentimen xenofobia di Prancis sendiri ada beberapa buku dan jurnal yang dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Rogers Brubaker menjelaskan mengenai pertama kalinya istilah xenofobia dipakai dalam studi Hubungan Internasional. Istilah xenofobia berkembang pada tahun 1880

pertama kali di Amerika Serikat ketika imigran yang berasal dari Eropa Timur datang. Namun sentimen xenofobia menyebar dengan cepat hingga ke daratan Prancis yang saat itu sedang mengalami revolusi pasca depresi ekonomi. Keadaan nasionalisme masyarakat Prancis kala itu mengalami ambiguitas karena terpecah menjadi dua golongan yaitu asimilasionis atau masyarakat yang bersedia menerima budaya baru dari etnis-etnis baru yang datang dibawa imigran dan ekslusionis atau masyarakat yang tidak ingin menerima imigran karena etnis mereka berbeda. Seiring dengan revolusi di Prancis, pemerintah sedang gencar untuk meningkatkan nasionalisme, namun nasionalisme kanan juga ikut tumbuh beriringan dengan xenofobia. Dari masyarakat nasionalis yang berpikiran ekslusionis tersebut muncullah istilah *counternasionalism*. Hingga saat ini pemikiran *counternasionalism* tersebut semakin kuat (Brubaker, 1992, hal. 112-5). Berbeda dengan Raymond Taras yang memusatkan pembahasan mengenai fenomena *Islamophobia*-nya saja dibandingkan dengan Brubaker yang membahas xenofobia secara umum di Jerman dan Prancis. Selain itu *islamophobia* tersebut diarahkan kepada pembicaraan politik. Namun, di satu sisi *islamophobia* menjadi ancaman bagi nilai dan norma yang telah ada di Eropa selama ini, oleh karenanya hal tersebut harus diatasi melalui kebijakan imigrasi dan integrasi yang dianut oleh Prancis (Taras, 2012, hal. 51-2). Walau kedua pendapat tersebut telah mencakup sedikit masalah dari penelitian, namun penjelasan kedua penulis tersebut tidak membahas bagaimana pengaruh kelompok-kelompok yang ada di Prancis dan penerapan kebijakan yang diadopsi dari EU dalam level domestik dan lokal.

Lalu, pendapat Hervik mengemukakan saat ini fenomena xenofobia memberi peningkatan yang signifikan terhadap protes-protes yang terjadi di Eropa

terutama di Prancis. Kelompok-kelompok anti-imigran, anti-orang asing atau anti-kelompok berbeda menjadi cerminan juga terhadap peristiwa 9/11 yang telah menjadi isu dunia. Bedanya pendapat Hervik lebih mengemukakan bahwa media sangat mengambil andil terhadap penyebaran sentimen tersebut seperti yang terjadi pada krisis kartun Muhammad di Denmark pada 2005 lalu. Selain itu, terror-teror yang terjadi dengan pengakuan kelompok Islam sebagai pelaku peristiwa tersebut juga menambah angka xenofobia di Eropa. Namun, Hervik mengklaim bahwa Islamofobia merupakan bagian dari xenofobia dan nativisme yang juga berpengaruh terhadap peningkatan sentimen xenofobia di Prancis. Xenofobia merupakan reaksi natural dari masyarakat terhadap anti-imigrasi yang terjadi di Eropa yang sedang meningkat. Peristiwa ini merupakan legitimasi atas ide 'satu budaya' yang harus ada di Prancis (Hervik, 2015, hal. 796-806). Namun, berbeda dengan pendapat David Haekwon Kim dan Ronald R. Sundstrom yang mengatakan bahwa xenofobia merupakan fenomena yang berbeda dibandingkan dengan fenomena rasisme dan nativisme dalam konsepnya. Rasisme merupakan salah satu dari sekian banyak penyebab terjadinya xenofobia di Prancis yang berpendapat bahwa kehadiran populasi imigran memiliki pengaruh terhadap sentimen xenofobia di Prancis. Namun dengan *Contact Theory* justru keduanya menemukan bahwa populasi imigran yang lebih besar mengurangi sikap xenofobia. Ini tentu kontradiktif dengan hasil survei yang dilakukan oleh baik Lembaga INSEE maupun Ipsos dan pendapat-pendapat lainnya (Sundstrom & Haekwon, 2014, hal. 25-31). Melengkapi pendapat Sundstorm dan Haekwon, menurut Abel Francois, fenomena xenofobia yang terbentuk di Perancis disebabkan oleh dua faktor yaitu adanya kontak dan kompetisi dengan imigran. Kedua aspek tersebut dilakukan harus

disamakan dengan adanya toleransi karena jika tidak maka akan menimbulkan xenofobia. Tetapi karena imigran dipandang sebagai kompetitor dalam mendapatkan sumber daya negara Prancis maka hal tersebut justru meningkatkan rasa intoleransi antar kedua pihak. Peningkatan juga diiringi ketika masyarakat asli merasa tersaingi dalam hal ekonomi dengan populasi imigran yang semakin bertambah di Prancis. Selanjutnya Francois meneliti keadaan tersebut dalam konteks *European Values Survey*. Francois menegaskan bahwa kontak dan kompetisi sangat memberikan efek terhadap toleransi kepada populasi imigran di Prancis. Mengikisnya toleransi juga didukung pada daerah kota-kota dengan populasi imigran yang tinggi dan angka pengangguran yang juga tinggi (Francois, Berton, & Matthews, 2013, hal. 47).

Sama halnya dengan imigran, sikap masyarakat Prancis terhadap minoritas di Prancis sendiri sudah tidak baik. Menurut Leah Bassel, minoritas wanita di Prancis dan di Inggris sangat tidak diuntungkan oleh keadaan sosial. Bassel mengatakan kekerasan dan penghinaan terhadap wanita dalam suatu kelompok minoritas. Wanita tersebut biasanya yang memiliki kulit hitam, Muslim, Latina dan lain lain. diskriminasi yang tinggi membuat terbentuknya pemikiran rasis hingga xenofobia. Hingga krisis ekonomi yang terjadi, kekerasan masih terbilang umum hingga pada tahun 2008 pasca krisis ekonomi di Eropa, pemerintah Prancis juga berusaha untuk memulihkan keadaan ekonomi sekaligus menumbuhkan rasa kesetaraan. Batu loncatan baru yang didapat adalah dengan menghapus prasangka terhadap minoritas perempuan dalam krisis ekonomi dan memusatkan perhatian terhadap kebijakan dan sumber daya agar hak-hak ekonomi siapapun dapat terealisasikan. Namun, hal tersebut tentu belum dapat membalikkan keadaan karena pemahaman yang sudah

tertanam dari generasi ke generasi mengenai minoritas utamanya adalah wanita. Oleh karena itu, diskriminasi terhadap kelompok minoritas wanita masih sering terjadi hingga saat ini jika dibandingkan dengan kelompok pria dalam minoritas tersebut (Bassel & Emejulu, 2017, hal. 99-114). Penulis di sini ingin mencoba untuk melengkapi dan mengkolaborasikan antara kebijakan pemerintah dan keadaan sosial di Prancis sehingga terjadinya peningkatan xenofobia. Selain itu peneliti ingin mencari titik tengah dan menggali lebih dalam mengenai xenofobia di Prancis pada periode kepemimpinan Francois Hollande dan Emmanuel Macron.

1.7 Perspektif Teori / Konsep

Penelitian ini akan diteliti melalui perspektif *Realistic Conflict Theory* (RCT). RCT diusung oleh seorang psikologis, Muzafer Sherif yang mengembangkan teorinya mengenai konflik inter-grup dalam percobaan lapangannya yang terkenal The Robbers Cave. Singkatnya, The Robbers Cave adalah sebuah percobaan yang dilakukan oleh Sherif bersama dengan temannya pada tahun 1954. Percobaan ini akan meneliti mengenai interaksi antar kelompok dengan melalui tiga fase. Percobaan ini melibatkan 22 orang anak yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok dari kulit putih dan kelompok kelas menengah. Kedua kelompok beranggotakan anak-anak yang berusia sekitar 12 tahun pada saat kamp musim panas di taman Robbers Cave Oklahoma selama dua minggu. Mereka memiliki latar belakang sosioekonomi, agama atau dari keluarga yang berbeda-beda dan tidak saling mengenal satu sama lainnya (Sherif M. , 1954, pp. 140-192).

Pada fase pertama, Sherif membagi anak-anak menjadi dua kelompok dan membiarkan interaksi hanya terjadi di dalam kelompok saja dengan tujuan untuk

membangun identitas kelompok. Melalui beberapa permainan, anak-anak akhirnya saling mengenal satu sama lain tanpa mengetahui adanya kelompok lain. Hubungan anak-anak begitu harmonis dalam satu kelompok.

Pada fase kedua, setelah identitas kelompok terbangun, kelompok akhirnya dikenalkan dengan kelompok lainnya. Sherif memutuskan untuk memberikan mereka permainan dengan persaingan antar kelompok. Persaingan ini dengan tujuan mendapatkan hadiah bagi kelompok yang menang dan tidak ada konsekuensi bagi yang kalah. Anak-anak mulai menunjukkan kesetiaan terhadap kelompok dan saling mencurigai terhadap kelompok lain. Pada awalnya, konflik tercipta hanya melalui aksi verbal antar kelompok seperti saling menjatuhkan dengan nama. Setelah kompetisi terjadi, konflik ini berkembang hingga terjadi vandalisme pembakaran bendera kelompok lain dan pencurian barang-barang pribadi kelompok lain yang menyebabkan orang dewasa harus menengahi. Tetapi setelah ditengahi, tetap saja tidak terbentuk rekonsiliasi antar kelompok (Sherif M. , 1954, p. 143).

Pada fase ketiga, Sherif menginginkan adanya *cooling down* antar kelompok. Sherif mencoba mengumpulkan kedua kelompok dalam satu ruangan dengan menonton bersama. Setelah itu, Sherif mencoba membuat situasi dimana antar kedua kelompok saling ketergantungan dalam mencapai sebuah tujuan dengan keuntungan yang setara antar kelompok. Keharmonisan tumbuh pada kedua kelompok ketika mereka sama-sama saling membutuhkan bantuan dan harus bekerja sama (Baumeister & Vohs, 2015, p. 726).

Setelah penelitian selesai, Sherif meminta kepada anak-anak untuk memberikan kesan terhadap kelompok mereka dan kelompok lainnya. Mereka rata-rata mencantumkan hal-hal baik terhadap anggota kelompok mereka dan hal buruk terhadap kelompok lain. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antar kelompok dapat memicu timbulnya prasangka dan perilaku diskriminasi. (Sherif M. , 1958, pp. 349-356).

RCT merupakan teori sosial psikologi yang timbul akibat adanya persaingan antara kelompok di dalam (*in group*) yang melihat bahwa kelompok pendatang (*out group*) sebagai kompetitor yang akan memanfaatkan sumber daya milik *in group* (Sherif, Harvey, White, Hood, & Sherif, 1988, hal. 25). Beberapa poin yang menjadi pemikiran inti dari RCT adalah sebagai berikut (Baumeister & Vohs, 2015, hal. 725-6):

1. Minimal terdapat dua kelompok atau lebih sebagai aktor yang memiliki tujuan berbeda dalam perebutan akses sumber daya yang terbatas.
2. Sumber daya yang diperebutkan dapat bersifat fisik (tanah, makanan atau air) dan psikologikal (status, kekuasaan atau martabat).
3. Adanya perbedaan status sosial ekonomi, etnisitas dan gaya hidup antar kelompok.
4. Memungkinkan terjadinya *zero-sum-game* jika seorang individu dari suatu kelompok merasakan kekalahan atau kemenangan mutlak dari kelompok lain.

Dari empat pemikiran inti RCT tersebut maka akan menghasilkan konflik, stereotip negatif, diskriminasi dan prasangka (*prejudice*) antar kelompok. Konflik

tersebut dapat menyebabkan meningkatnya permusuhan antar kelompok dan perseteruan yang tak kunjung usai (Dodson, 2010). Sedangkan menurut Stephan, hasil dari prasangka sendiri dapat didukung dengan ancaman-ancaman yang timbul dari *out group* terhadap *in group*. Ancaman-ancaman tersebut terdiri dari:

1. Ancaman realistik (*realistic threat*), terjadi ketika kekuasaan ekonomi dan politik *in group* dianggap tertantang oleh *out group*.
2. Ancaman simbolik (*symbolic threat*), terjadi ketika adanya perbedaan nilai, kepercayaan, moral dan sikap antara *in group* dan *out group*.
3. Stereotip yang negatif (*negative stereotype*), tercipta ketika *in group* mengalami atau menyaksikan pengalaman-pengalaman buruk yang melibatkan *out group*.
4. Kegelisahan antar kelompok (*intergroup anxiety*), terjadi karena adanya stereotip negatif sehingga *in group* memilih untuk tidak berinteraksi dengan *out group*.

Ancaman-ancaman tersebut terkait langsung dengan konflik dalam pandangan dunia jika adanya perbedaan nilai, kepercayaan dan sikap yang terancam dari pendatang baru. Ancaman-ancaman tersebut juga menimbulkan perilaku “menghindar” yang dilakukan oleh *in group* terhadap timbulnya interaksi yang tidak baik dengan *out group*. Selain itu, individu dari *in group* merasa terancam dalam hal *self-image* jika melakukan interaksi dengan individu *out group*, ancaman tersebut bisa menimbulkan kegelisahan berkelanjutan (Stephan & Stephan, 1996 hal 33).

Dari gagasan yang diusung oleh teori RCT tersebut maka penelitian ini akan menjelaskan mengenai konflik inter-group dengan masyarakat Prancis sebagai *in group* dan orang-orang asing sebagai *out group*. Jika dilihat dari penerapan teorinya, *In group* di sini dimaksudkan kepada masyarakat Prancis yang memiliki sentimen xenofobia baik sebagai individu maupun termasuk dalam suatu kelompok anti-orang asing. Sedangkan *Out group* di sini dimaksudkan kepada orang asing, minoritas dan imigran yang ada di Prancis.

Masyarakat Prancis merasa terancam oleh orang asing, minoritas dan imigran baik yang ada di Prancis maupun yang hendak datang ke Prancis dalam segi ekonomi dan politik utamanya. Kesempatan pekerjaan, status sosial maupun politik direbut oleh *out group* sehingga adanya pendapat bahwa hak mereka direnggut. Terutama pemerintah Prancis yang mengeluarkan kebijakan mengenai penyetaraan imigran atas hak-hak mereka sebagai manusia (Library of Congress, 2016). Selain itu, rasa nasionalisme yang tinggi membuat masyarakat Prancis tidak ingin *out group* datang karena identitas mereka berbeda dan hal tersebut lantas dikatakan akan mengganggu identitas masyarakat Prancis yang sudah tertanam sejak lama.

Jadi, peristiwa-peristiwa tersebut merupakan pemicu terbentuknya konflik antara masyarakat Prancis dengan *out group*. Prasangka buruk yang terus meningkat juga timbul dari ancaman-ancaman yang telah dipaparkan di atas seperti:

1. Ancaman realistik, tentunya ada kecemburuan yang timbul dari *in group* dalam segi ekonomi terutama pemerintah juga mengeluarkan bantuan-bantuan ekonomi agar tercapainya kesetaraan bagi setiap golongan

masyarakat di Prancis. *In group* bisa jadi merasakan adanya “perenggutan” hak ekonomi yang seharusnya untuk mereka tetapi disalurkan kepada para pendatang. Masyarakat Prancis sendiri berpendapat pemerintah harus lebih fokus terhadap kesejahteraan mereka terlebih dahulu (French Culture, 2011). Selain itu Aspek kedua yaitu politik dimana ketakutan akan hak politik terbagi kepada masyarakat pendatang yang notabeneanya bukan keturunan Prancis (Briancon, 2017).

2. Ancaman simbolis, karena terdapatnya perbedaan nilai, kepercayaan, moral dan sikap antara masyarakat Prancis dengan pendatang tentu membuat masyarakat Prancis segan menerima pendatang karena adanya rasa nasionalisme yang kuat dan agar nilai, kepercayaan, moral dan sikap masyarakat tetap seperti sedia kala (Nossiter, 2016).
3. Kegelisahan antar kelompok, rasa tidak percaya diri bisa timbul dalam masyarakat Prancis karena adanya generalisasi yang buruk mengenai orang-orang asing.
4. Stereotip yang negatif, generalisasi yang sudah ada di masyarakat tersebut merupakan generalisasi negatif yang timbul dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya dan berkaitan dengan orang-orang asing bahkan minoritas yang ada di Prancis (Stokes B. , 2016).

Selanjutnya, penelitian ini akan meneliti sejauh mana konflik yang terjadi antar kedua kelompok tersebut lebih dalam lagi dengan bukti data-data yang ada lalu bagaimana efektivitas usaha pemerintah dalam menurunkan sentimen xenofobia di Prancis telah banyak dilakukan namun tetap terjadi peningkatan angka xenofobia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dimana metode yang digunakan dengan melalui studi pustaka terhadap subjek yang diteliti. Studi pustaka yang digunakan tentu yang berkaitan dengan studi kasus meningkatnya sentimen xenofobia yang terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah imigran yang ada di Prancis dari tahun 2010 hingga tahun 2017. Penelitian kualitatif sendiri memiliki definisi yaitu sebuah metode yang digunakan dalam suatu penelitian dengan hasil data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik secara tertulis maupun secara lisan yang didapat dari hasil penelitian literatur yang dilakukan oleh orang lain. Selain itu data dapat diperoleh melalui wawancara (Yusuf, 2014, hal. 328). Dimulai dengan studi pustaka yang telah dilakukan, belum ditemukannya kajian yang membahas mengenai peningkatan sentimen xenofobia seiring dengan meningkatnya jumlah imigran di Prancis pada tahun 2010 hingga 2017. Peningkatan tersebut memiliki paradoks dengan usaha pemerintah dalam memerangi sentimen xenofobia. Paradoks tersebut belum pernah dijadikan sebagai variabel penelitian sebelumnya.

1.8.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi bahasan penelitian adalah masyarakat Prancis yang memiliki sentimen xenofobia sebagai subjek utama. Selain itu, pemerintah Negara Prancis sebagai aktor yang membuat kebijakan.

1.8.3 Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan melalui kajian-kajian tertulis seperti buku-buku, jurnal, dokumen, artikel di internet. Setiap kajian yang

ditemukan tentunya harus berkaitan dengan topik penelitian. Penelusuran pustaka ini juga dilakukan di tempat-tempat seperti perpustakaan-perpustakaan dan toko buku yang berada di Yogyakarta sebagai referensi buku. Berdasarkan Teknik penulisan melalui penelusuran pustaka, maka data yang diperoleh merupakan data sekunder. Data sekunder dapat diperoleh melalui penelusuran tulisan-tulisan dari buku, jurnal dan artikel-artikel online yang berkaitan dengan topik penulisan.

1.8.4 Proses Penelitian

Setelah seluruh data yang berkaitan dengan topik penelitian telah terkumpul, lalu data-data tersebut akan dianalisis dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu dengan mengkaji data-data yang ada agar didapat informasi yang mendetail dan pengetahuan mengenai materi yang lebih dalam sehingga ditemukan gagasan kesimpulan per pembahasan. Kesimpulan tersebut dicatat secara tersusun dan terstruktur. Kemudian, pembagian gagasan hasil kajian yang telah dilakukan berdasarkan kesimpulan per pembahasan tadi melalui beberapa sub-bab yang akan diurutkan secara berurutan sesuai waktu. Selanjutnya adalah penjelasan mendetail dengan deskripsi dari hasil pembagian dari sub-bab terkait. Lalu, tahap terakhir adalah penarikan pemikiran atau interpretasi dari temuan dan deskripsi yang telah dilakukan sehingga menjadi sebuah kesimpulan menyeluruh sebagai hasil dari penelitian (Creswell, 2003, hal. 49-50).